

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN,  
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DAN CAPITAL  
INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2016-2021**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**MAULANA IRFAN  
1801035231  
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021

Nama Mahasiswa : Maulana Irfan

NIM : 1801035231

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Sarjana Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 15 Juni 2023  
Pembimbing,



Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS, CSRA  
NIP. 19670516 199802 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620512 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 22 Mei 2022

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021

Nama Mahasiswa : Maulana Irfan

NIM : 1801035231

Hari : Senin

Tanggal Ujian : 22 Mei 2023

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS, CSRA  
NIP. 19670516 199802 1 001



2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CfrA., CIQaR  
NIP. 19801224 200801 1 006



3. Yoremia Lestari br.Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CSRS., CSRA  
NIP. 19850221 201404 2 001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 15 Juni 2023

  
Maulana Irfan

## ABSTRAK

Maulana Irfan, **Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020**, Iskandar, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel sehingga memperoleh 60 data pengamatan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan alat SPSS versi 22. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal, *capital intensity*, penghindaran pajak

## ABSTRACT

Maulana Irfan, **Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021**, Iskandar. This study aims to examine the influence of independent commissioners, fiscal loss compensation, and capital intensity on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2016-2021. This study used purposive sampling technique to determine the sample, resulting in 60 observation data. Data were analyzed using multiple linear regression analysis technique with SPSS version 22. Based on the results of the study, it was found that independent commissioners have a negative and significant influence on tax avoidance, fiscal loss compensation has a negative but not significant influence on tax avoidance, and capital intensity has a positive and significant influence on tax avoidance.

**Keywords:** independent commissioners, fiscal loss compensation, capital intensity, tax avoidance.

## RIWAYAT HIDUP



Maulana Irfan, lahir di Tenggarong pada tanggal 30 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Irwansyah dan Ibu Suparmi. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Muhammadiyah 1 Tenggarong pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011 di SD 007 Tenggarong. Kemudian, melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Tenggarong pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Lalu, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Negeri 3 Tenggarong pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi pada tahun 2018 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Sejak tahun 2018, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2020, Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik Covid 19 Universitas Mulawarman bertempat di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 15 Juni 2023

Maulana Irfan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Irfan  
NIM : 1801035231  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

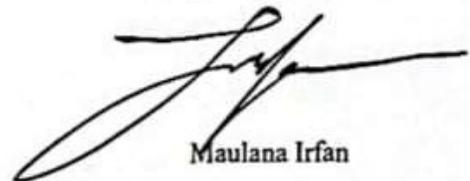
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformat, mengeloladalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Samarinda

Tanggal : 15 Juni 2023

Yang menyatakan



Maulana Irfan

NIM : 1801035231

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita semua, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021”** 2.sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
3. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CfrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sekaligus pembimbing dalam banyak hal yang

telah memberikan penulis kesempatan untuk memiliki pengalaman dan pelajaran yang baik pada saat perkuliahan

6. Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA sebagai dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak pengetahuan bermanfaat baik dalam hal skripsi maupun di dalam perkuliahan
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan
8. Seluruh Staf Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan
9. Ibu penulis Suparmi, Bapak penulis Irwansyah, Bunda penulis Wilsa Brawida, dan Ayah penulis Bambang Suryanto yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, serta adik-adik penulis Aulia Asri, Rizq Hulman, dan Yusuf Muhammad Ramadhan yang selalu memberikan semangat serta dukungan hingga akhir
10. Amalia Eka Agustina yang selalu memberikan support dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi. Semoga dimudahkan dalam mengejar gelar Sarjana Ekonomi-nya
11. Very Nurhaykal yang selalu support dan mengajari penulis hal-hal yang sulit dalam pengerjaan skripsi. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

12. Keluarga Besar HMJ Akuntansi khususnya periode 2021 yang telah memberikan penulis kesempatan dalam berkembang dan berproses dalam banyak hal semasa perkuliahan. Khususnya kepada rekan Pengurus Harian penulis yaitu Siti Nur Aliza, Nina Subagio Achmari, Abdurrahman Al-Ghafiqi, Jodhi Kadarusman, Taufik Rahmat Hidayat, Betris Kalapadang, Siti Rahmah, dan Kainama, Prascya Antonia dan adik-adik penulis yaitu Syaiful, Fahri, Rahmad, dan Alfi yang sangat memudahkan penulis dalam mengemban amanah di HMJ Akuntansi periode 2021
13. Kawan-kawan “Pelatihan Mental” yaitu Andi, Daniar, Erdy, Ewa, Iqram, Johan, Ray Sihab, Rayhandi, dan Taufik yang memberikan dukungan, motivasi dan hiburan dalam pengerjaan skripsi
14. Kawan-kawan “Berandal Sukses” terutama Jafar, Fajar, Farel, Yanda, dan Dede yang tetap berusaha menjaga pertemanan, menghibur penulis dan membantu penulis dalam banyak hal
15. Kawan-kawan Mahasiswa Prodi Sarjana Akuntansi angkatan 2018 seperti Dedy, Kei, Rino yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berteman dengan kalian merupakan salahsatu pengalaman berharga bagi penulis
16. PT. Etam Group yang telah mengizinkan penulis bekerja sembari menyusun skripsi serta memberikan support

17. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 15 Juni 2023

Maulana Irfan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat .....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Agensi .....	9
2.1.2. Komisaris Independen .....	11
2.1.3. Kompensasi Kerugian Fiskal.....	13
2.1.4. <i>Capital Intensity</i> .....	14
2.1.5. Penghindaran Pajak .....	15
2.2. Penelitian Terdahulu .....	15
2.3. Kerangka Konseptual.....	17
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	20
2.4.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak ..	20

2.4.2. Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak .....	21
2.4.3. Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak .....	22
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1. Definisi Operasional .....	24
3.1.1. Variabel Dependen/Terikat (Y).....	24
3.1.2. Variabel Independen ( $X_1$ ).....	24
3.1.3. Variabel Independen ( $X_2$ ).....	25
3.1.4. Variabel Independen ( $X_3$ ).....	25
3.2. Populasi dan Sampel.....	26
3.2.1. Populasi .....	26
3.2.2. Sampel .....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.1. Jenis Data.....	27
3.3.2. Sumber Data .....	28
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5. Analisis Data.....	28
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	28
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	28
3.5.3. Uji Kelayakan Model .....	30
3.5.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	31
3.5.5. Uji Hipotesis.....	31
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
4.2. Hasil Penelitian .....	33
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	33
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	35
4.2.3. Uji Kelayakan Model .....	42
4.2.4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
4.2.5. Hasil Uji Hipotesis .....	45
4.3. Pembahasan.....	47
4.3.1 Pengaruh Komisararis Independen terhadap Penghindaran Pajak ...	47
4.3.2 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak .....	48

4.3.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak.....	50
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	16
Tabel 3.1.Penentuan sampel berdasarkan <i>purposive sampling</i> .....	28
Tabel 3.2.Daftar sampel perusahaan pertambangan .....	28
Tabel 4.1.Data penelitian .....	34
Tabel 4.2.Analisis statistik deskriptif.....	34
Tabel 4.3.Uji K-S di awal .....	37
Tabel 4.4. Uji K-S di akhir.....	38
Tabel 4.5.Uji multikolinearitas .....	40
Tabel 4.6.Uji autokorelasi <i>Durbin Watson</i> .....	41
Tabel 4.7.Uji autokorelasi <i>run test</i> .....	41
Tabel 4.8.Uji <i>glejser</i> .....	42
Tabel 4.9.Uji F .....	43
Tabel 4.10.Uji koefisien determinasi <i>adjusted R-square</i> .....	44
Tabel 4.11.Analisis regresi linear berganda.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual .....	20
Gambar 2.2 Model penelitian.....	24
Gambar 4.1 Uji normalitas grafik histogram sebelum <i>outlier</i> .....	37
Gambar 4.2 Uji normalitas grafik histogram sesudah outlier .....	38

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
G20	<i>Group of Twenty</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
LK	Lembaga Keuangan
ETR	<i>Effective Tax Rate</i>
PDKI	Proporsi Dewan Komisaris Independen
CIR	<i>Capital Intensity Rate</i>
SPSS	<i>Statistical Program for Social Science</i>
DW	<i>Durbin Watson</i>
VIF	<i>Variance Inflation Facto</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penghindaran Pajak.....	58
Lampiran 2. Data Komisaris Independen.....	61
Lampiran 3. Data Kompensasi Kerugian Fiskal .....	63
Lampiran 4. Data <i>Capital Intensity</i> .....	65
Lampiran 5. Data <i>Outlier</i> .....	67
Lampiran 6. Data <i>Output</i> Hasil Uji SPSS 22 .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2022) merupakan sumbangan yang bersifat memaksa bagi objek pajak yang didefinisikan berdasarkan undang-undang perpajakan. Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas. Kemudian pajak memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendapatan negara untuk tujuan kebijakan, investasi dan kesejahteraan rakyat. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan di Indonesia yang paling besar di mana pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak sendiri akan digunakan kembali untuk didistribusikan kepada masyarakat dan negara akan memungut kembali pajak dari masyarakat untuk mengukur Pendapatan Domestik Bruto.

Upaya untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membutuhkan peran otoritas pajak dalam memungut pajak. Otoritas pajak merupakan agen dari pemerintah yang memiliki tugas untuk memungut penerimaan pemerintah. Otoritas pajak didefinisikan sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut pajak. Pemerintah sendiri mengasumsikan pajak sebagai penerimaan yang memberikan manfaat untuk negara. Dalam proses pemungutan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk memungut penerimaan berupa pajak, bea dan cukai. Penerimaan tersebut kemudian akan didistribusikan kembali kepada masyarakat.

Sebaliknya, wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang dapat menyebabkan penurunan hartanya sendiri. Wajib pajak adalah orang atau badan yang mematuhi kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk membayar pajak, wajib pajak harus memenuhi persyaratan tertentu. Wajib pajak sendiri mengasumsikan pajak sebagai kerugian karena pajak dapat mengurangi keuntungan atau aset dari wajib pajak itu sendiri.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan sistem perekonomian terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu anggota dari *Group of Twenty* (G20) (g20.org, 2022). Sistem perekonomian Indonesia yang besar didukung oleh beberapa faktor dan salah satu faktor tersebut adalah pendapatan terbesar di Indonesia yang berasal dari pajak. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan pajak belum memenuhi target. Hanya 81,6% dari target penerimaan pajak Rp1.355,2 triliun yang terealisasi pada 2016, atau Rp1.106 triliun. Kemudian, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.147,5 triliun atau 89,4% dari tujuan sebesar Rp1.286,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pada tahun 2018 tumbuh sebesar Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun. Akibat pemungutan pajak yang tidak merata dan realisasi penerimaan yang tidak konsisten selama lima tahun terakhir, target realisasi penerimaan pajak tidak tercapai. Hanya 81,6% dari target penerimaan pajak Rp 1.355,2 triliun yang terealisasi pada 2016, atau Rp

1.106 triliun. Kemudian, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.147,5 triliun atau 89,4% dari tujuan sebesar Rp1.286,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pada tahun 2018 tumbuh sebesar Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun. Akibat pemungutan pajak yang tidak merata dan realisasi penerimaan yang tidak konsisten selama lima tahun terakhir, target realisasi penerimaan pajak tidak tercapai. Hanya 81,6% dari target penerimaan pajak Rp 1.355,2 triliun yang terealisasi pada 2016, atau Rp 1.106 triliun. Kemudian, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.147,5 triliun atau 89,4% dari tujuan sebesar Rp1.286,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pada tahun 2018 tumbuh sebesar Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun..

Salah satu kasus datang dari salah satu perusahaan sektor pertambangan yaitu PT Jhonlin Baratama, perusahaan pertambangan, terlibat dalam kasus penghindaran pajak dengan memanfaatkan koneksi politik dari pejabat pajak guna meminimalisir besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang dituding melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, untuk menghindari pajak melalui manajemen laba. Kurangnya transparansi pelaporan pajak masih menjadi masalah dalam sektor pertambangan, dengan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang melaporkan secara transparan mengenai pajak pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021). Oleh karena itu, penelitian pada perusahaan pertambangan dalam periode 2016-2021 diperlukan untuk memastikan kecukupan dan keakuratan data.

Dikarenakan pajak yang bersifat memaksa, pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh perusahaan selaku wajib pajak. Agar wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajak yang telah ditentukan, wajib pajak pada umumnya melakukan tindakan tertentu. Penghindaran pajak merupakan salah satunya. Cara penghindaran pajak yang sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan ini dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri terjadi akibat perbedaan kepentingan antara DJP dan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak mencari celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi beban pajaknya, sedangkan otoritas pajak memaksimalkan penerimaan pajak melalui ketentuan yang berlaku.

Penghindaran pajak tentunya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian terdahulu, penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut seperti komisararis independen, kompensasi kerugian fiskal dan *capital intensity*. Peneliti memilih faktor-faktor tersebut sebagai variabel dikarenakan penelitian terdahulu terkait hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak masih belum banyak diteliti.

Salah satu faktor dari penghindaran pajak adalah komisararis independen. Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa komisi independen dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ini menggambarkan bagaimana memiliki lebih banyak komisararis yang tidak memihak membantu mengurangi penghindaran pajak. Penelitian serupa juga pernah diteliti oleh Dewi (2019) yang berpendapat jika dewan komisararis yang tidak memihak dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Kuantitas penghindaran pajak di suatu perusahaan dapat dikurangi dengan jumlah komisaris independen.

Tidak hanya dari faktor komisaris independen, perusahaan dapat melakukan praktik pajak melalui kompensasi kerugian fiskal. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian dari Safitri dan Mulyana. Menurut Safitri & Irawati (2021), Bisnis yang mendapatkan kompensasi atas kerugian fiskal pada tahun tertentu mungkin membayar lebih sedikit pajak secara keseluruhan. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan celah dan kesempatan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Mulyana *et al.* (2020), upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak akan berkurang ketika menerima kompensasi kerugian fiskal. Karena perusahaan kebal dari kewajiban pajak yang telah ditentukan sebelumnya ketika menderita kerugian finansial. Sehingga, perusahaan tersebut di tahun berikutnya dapat melaporkan laporan keuangannya secara wajar.

Faktor selanjutnya adalah *capital intensity* yang merupakan salah satu faktor penghindaran pajak. Sebelumnya penelitian ini dibuktikan oleh Saputra dan Humairoh. Menurut Saputra *et al.* (2020), *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan ketika korporasi telah mengakui pengeluaran penyusutan tetapi penyusutan tidak termasuk dalam perhitungan pajak sehingga menghasilkan penyesuaian positif, metodologi penyusutan yang digunakan dalam akuntansi dan pajak berbeda. Sedangkan, menurut Humairoh & Triyanto (2019) perusahaan yang memiliki aset tetap dengan jumlah yang besar akan memiliki beban penyusutan yang besar juga. Beban penyusutan yang menjadi komponen tetap pada aset tetap akan menjadi pengurang pajak. Hal ini tentunya juga dapat

dimanfaatkan oleh manajemen untuk meminimalisir pajak terutama laporan fiskal dan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian terkait komisar independen, kompensasi kerugian fiskal dan *capital intensity* yang berhubungan dengan penghindaran pajak masih terbatas. Akibatnya, peneliti tertarik untuk mempelajari hubungan antara penggunaan komisar independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity* pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu dari Putra & Merkusiwati (2016) tentang pengaruh komisar independen terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa komisar independen memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Doho & Santoso (2020), pengaruh dari komisar independen terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa komisar independen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Irawati (2021) tentang kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa mengkompensasi kerugian finansial secara signifikan mengurangi penggelapan pajak. Sedangkan menurut Humairoh & Triyanto (2019), kompensasi kerugian fiskal memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya adalah penelitian dari Humairoh & Triyanto (2019) tentang *capital intensity* terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa Penghindaran pajak berkurang secara signifikan oleh *capital intensity*. Sedangkan menurut Sugiyanto *et al.* (2020), *capital intensity* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti sampaikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian. Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Kerugian Fiskal dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini yang didasarkan pada latar belakang penelitian yang telah peneliti uraikan di atas:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Apakah kompensasi kerugian fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian, seperti yang dijabarkan dalam rumusan masalah di atas:

1. Menganalisis dan mengevaluasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

2. Menganalisis dan mengevaluasi pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Menganalisis dan mengevaluasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

#### **1.4 Manfaat**

Berikut beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan. Kajian tersebut selanjutnya dapat dipublikasikan sebagai literatur dan berkontribusi pada penelitian baru tentang dampak penghindaran pajak terhadap usaha pertambangan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan perpajakan khususnya di bidang perusahaan pertambangan di Indonesia secara efektif dan sebaik mungkin

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori agensi yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Teori agensi dikemukakan oleh Jensen & Mekling (1976) yang mengatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh *principal* yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh *agent*. Namun, *principal* maupun *agent* memiliki kepentingan masing-masing.

Teori agensi kemudian dikembangkan oleh Eisenhardt (2009) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Memiliki kepentingan pribadi
2. Memiliki keterbatasan daya pikir mengenai persepsi masa yang akan datang
3. Menghindari resiko

Dari ketiga pendapat tersebut, manusia lebih mengutamakan kepentingan khusus untuk mengambil suatu tindakan salah satunya merupakan penghindaran pajak.

Teori agensi mendeskripsikan tentang diferensiasi kepentingan antar prinsipal dan agensi dikarenakan memiliki tujuan terkait keuntungan yang berbeda. Pada teori ini, *principal* diasumsikan sebagai pemerintah yang di representatitkan

oleh otoritas pajak. Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DJP. Sedangkan *agent* diasumsikan sebagai wajib pajak yang di mana wajib pajak tersebut merupakan perusahaan atau perorangan yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak.

Otoritas pajak dan wajib pajak tentunya memiliki kepentingan yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan asumsi keuntungan terkait pajak tersebut. Otoritas pajak menganggap bahwa pajak merupakan penerimaan yang berbentuk pajak, bea, maupun cukai. Penerimaan tersebut tentunya memberikan manfaat untuk negara yang kemudian manfaat tersebut akan disalurkan kembali untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Berbeda halnya dengan wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan kerugian dikarenakan wajib pajak harus mengeluarkan hartanya untuk membayar pajak yang berlaku. Hal tersebut tentunya mengurangi harta wajib pajak. Tentu saja, pajak juga mengurangi keuntungan wajib pajak.

Asumsi kerugian oleh wajib pajak tersebut dapat menimbulkan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari celah ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan perpajakan tersebut. Dari sudut pandang yang berbeda, penghindaran pajak merupakan suatu kerugian bagi otoritas pajak dikarenakan otoritas pajak tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang bisa didapatkan.

Penghindaran pajak dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Beberapa faktor yang peneliti gunakan adalah komisarisi independen, kompensasi kerugian fiskal dan *capital intensity*. Komisarisi independen dapat menentukan arah

kebijakan dari perusahaan melalui keputusan jajaran pemegang saham terbanyak. Melalui komisaris independen, perusahaan melaksanakan serangkaian pengarahan dan pengelolaan yang meliputi beberapa aspek seperti perpajakan. Penghindaran pajak tentunya menjadi tanggung jawab bagi jajaran komisaris dan direksi dikarenakan jajaran tersebut yang dapat dan memiliki wewenang perpajakan perusahaan.

Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak melalui kompensasi kerugian fiskal. Perusahaan bisa mendapatkan kompensasi kerugian fiskal jika perusahaan memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan mengalami kerugian pada masa tertentu, maka tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah nihil. Sehingga kompensasi kerugian fiskal dapat dijadikan faktor praktik penghindaran pajak.

Karena perusahaan besar sebagai pembayar pajak memiliki aset tetap yang banyak, maka *capital intensity* diduga menjadi faktor penghindaran pajak. Aset tetap ini memiliki potensi biaya penyusutan yang tinggi. Beban tersebut tentunya dapat mengurangi tarif pajak yang sudah ditentukan.

### **2.1.2. Komisaris Independen**

Perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan sejatinya memiliki dewan komisaris dan salah satu anggota dari dewan komisaris di antaranya adalah komisaris independen. Menurut Otoritas Jasa Keuangan RI (2014) Nomor: 33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari

luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Menurut Kementerian Keuangan RI (2012) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan IX.1.5, Anggota Dewan Komisaris yang independen terhadap Emiten atau Perusahaan Publik disebut sebagai komisaris independen dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Komisaris independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten dan tidak terafiliasi oleh pemegang saham utama, individu yang berbeda dari direktorat dan pejabat. Kehadiran komisaris independen yang dominan diharapkan dapat meningkatkan integritas keuangan manajemen perusahaan dengan mengurangi pelanggaran pelaporan pajak yang dilaporkan.

### **2.1.3. Kompensasi Kerugian Fiskal**

Dalam perjalanan suatu bisnis, terkadang perusahaan memiliki kerugian di tahun-tahun tertentu. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”. Ayat ini menjelaskan bahwa jika pendapatan perusahaan yang di mana adalah wajib pajak

tidak melebihi beban, maka pajak yang ditarifkan kepada wajib pajak adalah nihil. Jika wajib pajak mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut, maka wajib pajak berhak mendapatkan kompensasi.

Hal ini diperkuat di pasal 25 ayat (6) point a yang berbunyi “Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian”. Tentunya, hal ini merupakan celah bagi wajib pajak untuk menghindari pajak yang telah ditentukan melalui kompensasi kerugian fiskal.

#### **2.1.4. *Capital Intensity***

Setiap perusahaan umumnya memiliki aset tetap dan dari aset tetap tersebut perusahaan melakukan pengelolaan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Menurut Dharma & Ardiana (2016), *capital intensity* merupakan seberapa besar investasi aset tetap yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang pendapatan perusahaan. Intensitas modal yang didapatkan melalui pemanfaatan aset tetap tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Namun, beban depresiasi yang dihasilkan tentunya mengurangi biaya pajak. Hal tersebut dapat dijadikan celah untuk melakukan penghindaran.

Menurut Wijayani (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* merupakan tindakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap berupa pemanfaatan aset tetap untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan khususnya aset tetap yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasional perusahaan.

### 2.1.5. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2016) praktek mencari-cari kekurangan dalam ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang tidak melanggar ketentuan tersebut dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Mayoritas bisnis memandang pajak sebagai beban yang berpotensi menurunkan laba sehingga menurut Santoso & Rahayu (2013) banyak perusahaan yang menurunkan beban pajaknya dengan cara yang legal maupun ilegal.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya yang dikutip sebagai contoh oleh peneliti yaitu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Putra & Merkusiwati, 2016)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage, Size &amp; Capital Intensity Ratio</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: positif dan tidak signifikan.  <i>Capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak: negatif dan tidak signifikan.
2.	(Rani, 2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: negatif signifikan.
3.	(Dewi, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: positif signifikan.

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4.	(Humairoh & Triyanto, 2019)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.  <i>Capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak: positif signifikan.
5.	(Kusufiyah & Anggraini, 2019)	Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan <i>Leverage</i> terhadap Usaha Penghindaran Pajak	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: negatif signifikan.
6.	(Doho & Santoso, 2020)	Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.
7.	(Mulyana <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.  Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.
8.	(Sugiyanto <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)	<i>Capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.
9.	(Saputra <i>et al.</i> , 2020)	<i>Effect od Executive Character," Capital Intensity and "Good Corporate Governance "to Tax Avoidance" (IDX 2015-2019 Food &amp; Beverages Sector Manufacturing)</i>	<i>Capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak: negatif signifikan.
10.	(Masrurroch <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: positif signifikan.  <i>Capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.
11.	(Pratomo & Rana, 2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris independen terhadap penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.
12.	(Safitri & Irawati, 2021)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri	Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak: positif tidak signifikan.  <i>Capital intensity</i> terhadap

Disambung ke halaman berikutnya

**Tabel 2.1 Sambungan**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)	penghindaran pajak: negatif tidak signifikan.

*Sumber : Review berbagai sumber referensi, 2022*

### 2.3. Kerangka Konseptual

Teori agensi mengatakan bahwa di dalam ekosistem bisnis, terdapat dua perbedaan antara agen dan principal. Kepentingan tersebut saling menguntungkan dan juga saling merugikan di antara kedua belah pihak dalam suatu instansi. Perbedaan tersebut akan menimbulkan suatu fenomena baru yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam penelitian ini, agen diasumsikan sebagai perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak merupakan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan, prinsipal diasumsikan sebagai DJP yang beranggapan bahwa pajak merupakan keuntungan bagi pemerintah dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Perbedaan anggapan terkait pajak tersebut menimbulkan konflik kepentingan terkait pajak tersebut. Konflik tersebut tentunya berkaitan dengan beban pajak di mana perusahaan selaku wajib pajak ingin meminimalisir beban pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang telah di atur di Indonesia.

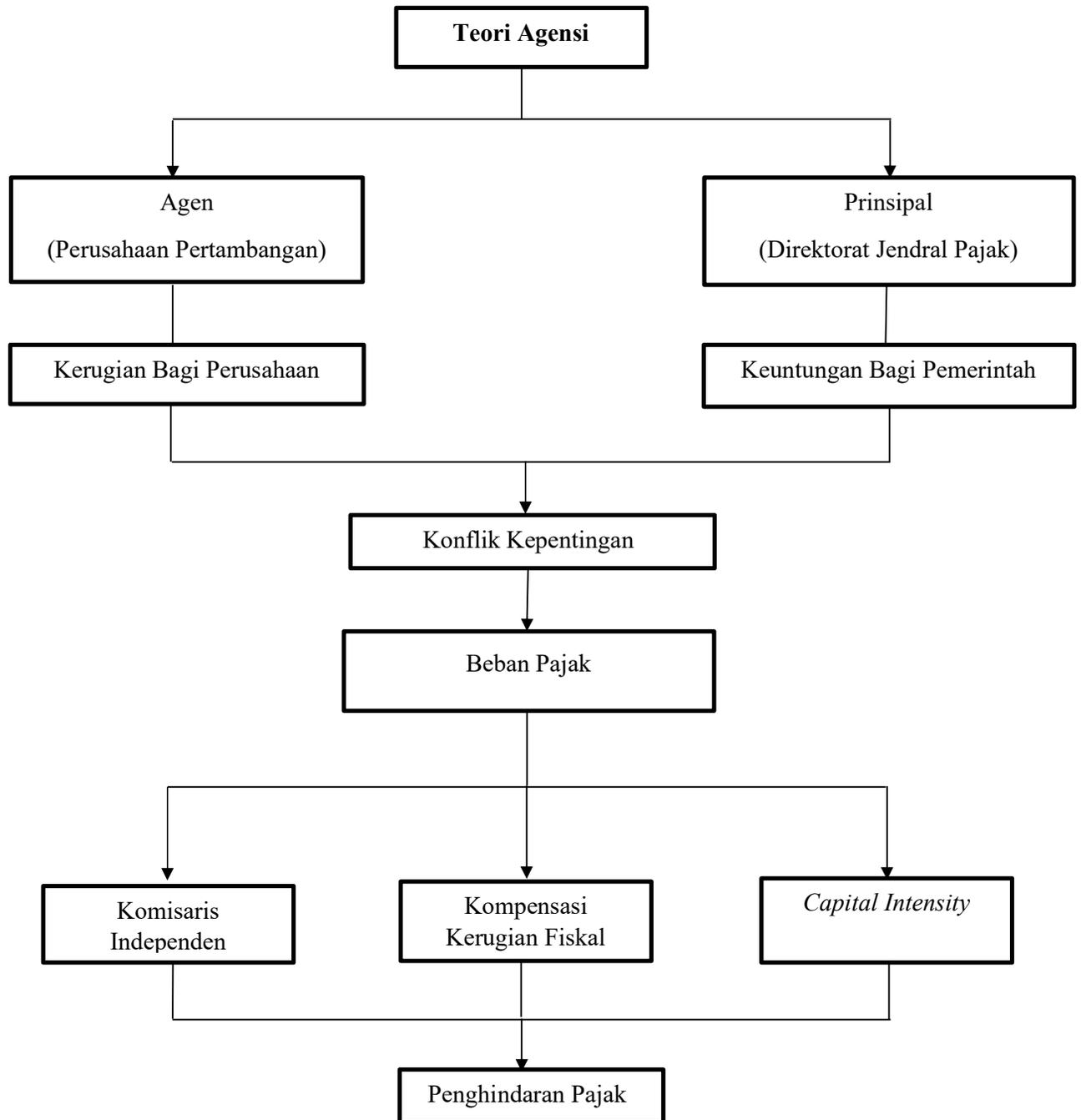
Beban pajak tersebut dapat diminalisir oleh beberapa faktor di antaranya adalah komisararis independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity*. Komisararis independen diharapkan dapat meminimalisasi beban pajak yang telah dikenakan untuk perusahaan melalui keputusan yang ditentukan oleh dewan

komisaris. Dikarenakan komisaris independen berasal dari pihak eksternal perusahaan, komisaris independen sendiri tidak mendapatkan pengaruh dari pihak eksternal yang besar dan dapat memutuskan pengurangan beban pajak dengan cara yang legal dan etis.

Kemudian perusahaan dapat memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal dengan cara membawa kerugian fiskal yang dapat dibawa ke masa depan sampai dengan batas waktu 5 tahun untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Meskipun perusahaan mengalami rugi secara fiskal bukan berarti perusahaan mengalami rugi secara komersial.

Perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak melalui *capital intensity*. Perusahaan dapat menginvestasikan modalnya untuk penambahan aset tetap guna menunjang operasional perusahaan dan juga menambah beban depresiasi untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan untuk perusahaan.

Setiap strategi pengurangan beban pajak dari faktor-faktor seperti komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal dan *capital intensity* merupakan bagian dari *tax planning* yaitu penghindaran pajak yang tentunya penghindaran pajak legal untuk dilakukan Berdasarkan penjabaran tersebut maka kerangka konseptual penelitian ini adalah seperti pada gambar 2.1 pada halaman selanjutnya :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Sumber : *Review Berbagai Artikel*

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Pada teori agensi, hubungan antara DJP (prinsipal) dan perusahaan pertambangan (agen) dianggap sebagai hubungan yang penuh konflik kepentingan. Perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan, prinsipal diasumsikan sebagai DJP beranggapan bahwa pajak merupakan keuntungan bagi pemerintah dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Mobilitas korporasi sangat diuntungkan oleh kerja komisaris independen. Tanpa pengaruh dari pihak internal perusahaan, komisaris independen dapat mengawasi jalannya organisasi dan menawarkan kebijakan. Penghindaran pajak merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan. Komisaris independen sendiri dapat menentukan keputusan perpajakan di dalam suatu perusahaan. Komisaris independen sendiri memiliki berbagai kepentingan. Namun, kebanyakan kepentingan tersebut tentunya adalah kepentingan pribadi komisaris independen. Kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat dengan jumlah komisaris independen.

Terdapat penelitian yang berkaitan pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu oleh Dewi (2019) dan Masrurroch *et al.* (2021) tentang pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa:

**H<sub>1</sub> : Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak**

#### **2.4.2. Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Pada teori agensi, hubungan antara DJP (prinsipal) dan perusahaan pertambangan (agen) dianggap sebagai hubungan yang penuh konflik kepentingan. Perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan, prinsipal diasumsikan sebagai DJP beranggapan bahwa pajak merupakan keuntungan bagi pemerintah dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Salah satu faktor penyebab penghindaran pajak yang berhubungan dengan pelaporan nihil adalah kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Namun, kerugian tersebut dicurigai dikarenakan perusahaan tersebut tetap berjalan. Perusahaan tentunya dapat memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan. Untuk mengaktifkan strategi penghindaran pajak, bisnis dapat diberi kompensasi dan kewajiban pajaknya dikurangi.

Terdapat penelitian terkait pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri & Irawati (2021) tentang kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

## **H<sub>2</sub> : Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak**

### **2.4.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

Pada teori agensi, hubungan antara DJP (prinsipal) dan perusahaan pertambangan (agen) dianggap sebagai hubungan yang penuh konflik kepentingan. Perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan kerugian bagi perusahaan. Sedangkan, prinsipal diasumsikan sebagai DJP beranggapan bahwa pajak merupakan keuntungan bagi pemerintah dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

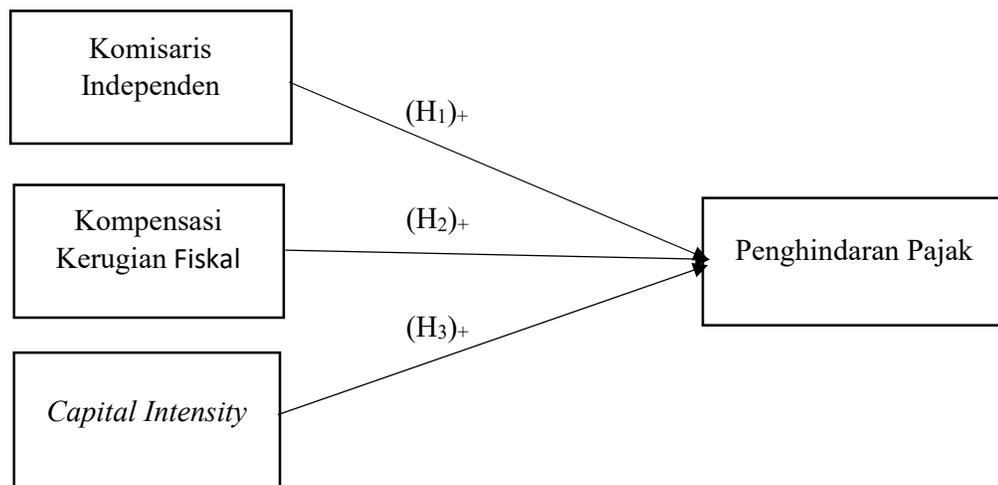
Salah satu faktor yang menyebabkan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan adalah *capital intensity*. *Capital intensity* sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola aset tetapnya untuk operasional perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab atas lebih banyak biaya penyusutan, semakin banyak aset tetap yang dimilikinya. Khususnya beban penyusutan berdasarkan sudut pandang perusahaan pertambangan dan DJP memiliki pandangan yang berbeda. DJP tentunya menilai penyusutan berdasarkan penyusutan fiskal. Perusahaan menggunakan ini sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Beban penyusutan fiskal yang besar dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar dapat dikurangi dengan usaha.

Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak menjadi bahan penelitian terdahulu. Penelitian dari Humairoh & Triyanto (2019) tentang *capital intensity* terhadap penghindaran pajak menyatakan bahwa *capital intensity*

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan hipotesis:

**H<sub>3</sub> : *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran**

Berikut adalah model penelitian sebagaimana diuraikan di atas:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

Sumber : *Review Berbagai Artikel*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Definisi Operasional

##### 3.1.1. Variabel Dependen/Terikat (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen penelitian ini. Dalam studi ini, penghindaran pajak adalah ketika wajib pajak mencoba untuk menurunkan beban pajak yang ditetapkan pemerintah dengan mencari celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa melanggarnya. Menurut Putri & Irawati (2019) pengukuran variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Badan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate*

Beban pajak penghasilan badan adalah pajak yang ditagih berdasarkan laba yang didapatkan perusahaan sesuai dengan tarif yang berlaku. Semakin kecil ETR, maka semakin besar kemungkinan perusahaan pertambangan melakukan penghindaran pajak

##### 3.1.2. Variabel Independen (X<sub>1</sub>)

Variabel tidak terikat yang dapat berdampak pada faktor lain dikenal sebagai variabel bebas. Beberapa variabel independen pada penelitian ini adalah komisaris independen (X<sub>1</sub>), kompensasi kerugian fiskal (X<sub>2</sub>) dan capital intensity (X<sub>3</sub>).

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari ruang lingkup eksternal perusahaan yang dapat memberikan kebijakan tanpa intervensi dari pihak lain. Menurut Maharani & Suardana (2014) pengukuran variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.2$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

### 3.1.3. Variabel Independen (X<sub>2</sub>)

Kompensasi kerugian fiskal merupakan metode pengalihan kerugian dari suatu tahun ke tahun selanjutnya untuk mendapatkan keringanan pajak. Indikator dalam variabel ini adalah variabel *dummy*. Jika perusahaan melakukan kompensasi kerugian fiskal pada suatu tahun maka diberi nilai 2 dan jika tidak diberi nilai 1. Kemudian data diubah ke dalam bentuk Ln agar memenuhi syarat regresi linear.

### 3.1.4. Variabel Independen (X<sub>3</sub>)

*Capital intensity* merupakan kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan aset dalam bentuk aset tetap dan mengelola aset tersebut sebaik mungkin. Menurut Muzakki & Darsono (2015) pengukuran variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.3$$

Keterangan :

CIR : *Capital Intensity Ratio*

## **3.2. Populasi dan Sampel**

### **3.2.1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah 38 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 dan 2021. Perusahaan pertambangan dipilih karena perusahaan pertambangan dalam aktivitas bisnisnya memberikan kontribusi perpajakan yang besar. Jika dibandingkan dengan variabel penelitian untuk mengevaluasi hipotesis yang ditetapkan, perusahaan pertambangan tidak diragukan lagi memiliki aset perusahaan yang sangat besar.

### **3.2.2. Sampel**

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* di mana teknik *purposive sampling* ini menentukan sampel dengan cara menggunakan kriteria yang sesuai dengan komponen dari variabel yang telah dipilih. Kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia yang laba dalam kurun periode 2016-2021 agar tidak mengalami distorsi dalam pengolahan data sampel.
3. Perusahaan pertambangan yang datanya mendukung dan sesuai dengan kriteria variabel yang diteliti seperti komponen dari pengukuran setiap variabel pada periode 2016-2021.

**Tabel 3.1. Penentuan Sampel Berdasarkan *Purposive Sampling***

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021.	38
2	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang rugi dalam kurun periode 2016-2021	(28)
3	Perusahaan di industri pertambangan yang datanya tidak memenuhi kriteria variabel yang diteliti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	0
Jumlah perusahaan		10
Jumlah data (10x6)		60

*Sumber : Data sekunder diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 3.1, diperoleh sampel penelitian sebanyak perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Adapun daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
2	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk
3	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk
4	HRUM	PT. Harum Energy Tbk
5	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
6	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk
7	TOBA	PT. TBS Energi Utama Tbk
8	ISSP	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia
9	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk
10	TBMS	PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk

*Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2022*

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1. Jenis Data

Peneliti menggunakan tipe data numerik, atau tipe data kuantitatif, dalam penyelidikan ini. Data tersebut diperoleh dari informasi yang berhubungan dengan

penelitian ini yang diperoleh dari *annual report* perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **3.3.2. Sumber Data**

Data sekunder atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk tahun 2016 hingga 2021, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyampaikan informasi tersebut dalam laporan tahunannya.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi tambahan, yaitu data khusus yang diperoleh secara tidak langsung melalui metode *download* pada situs resmi perusahaan. Data ini masuk dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021.

### **3.5. Analisis Data**

Aplikasi SPSS 22.0 digunakan untuk analisis statistik regresi linier berganda dalam penelitian ini.

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah salah satu di mana nilai terendah, maksimum, rata-rata (rata-rata), dan standar deviasi digunakan untuk menggambarkan setiap variabel penelitian dalam bentuk garis besar.

#### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Untuk memenuhi asumsi dasar regresi linier berganda, termasuk tidak adanya autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dalam penelitian ini,

maka digunakan metode pengujian asumsi klasik. Jika terjadi penyimpangan dalam uji ini, maka model penelitian ini tidak dapat digunakan untuk penelitian.

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Menurut model penelitian, uji normalitas data ini harus dijalankan sebelum data ditangani. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran data pada variabel penelitian. Data dengan distribusi normal dapat diterima dan layak digunakan dalam penelitian. Tes *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat digunakan untuk menentukan apakah data normal. Data dapat dikategorikan berdistribusi apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa ( $\alpha = 0,05$ ) dan jika nilai probabilitasnya kurang dari nilai alfa, maka data tidak berdistribusi dengan normal.

### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Untuk memastikan apakah variabel bebas dalam suatu model berhubungan atau tidak, maka dilakukan uji multikolinearitas. Variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen dari model penelitian yang lainnya akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Menurut Gani & Amalia (2018) model regresi yang efektif harus bebas multikolinearitas. Uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance*  $> 0.10$ , maka tidak ada gejala multikolinearitas.

### **3.5.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi berusaha untuk menetapkan ada tidaknya korelasi antara faktor perancu pada saat tertentu dengan variabel sebelumnya. Menurut Gani &

Amalia (2018) uji Durbin Watson (DW) dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan dalam penelitian ini.

#### **3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Gani & Amalia (2018) menyatakan uji heteroskedastisitas menguji adanya perbedaan antara varian dan nilai sisa. Uji Glejser adalah salah satu metode untuk menentukan apakah varian dalam residual satu pengamatan berbeda dengan yang lain dalam model regresi. Jika terjadi, fenomena ini disebut heteroskedastisitas, dan variabel dinyatakan dalam posisi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Perhitungan uji geljser menggunakan *software* SPSS yang akan terlihat pada *Scatterplot*.

#### **3.5.3. Uji Kelayakan Model**

##### **3.5.3.1 Uji F**

Uji kelayakan model mengukur dampak simultan dari semua faktor independen dan dependen terhadap variabel dependen. Menurut Gani & Amalia (2018) Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi suatu model. Jika nilai F suatu model memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka model regresi dikatakan layak. Model akan layak jika nilai signifikansi  $< 0,05$ .

##### **3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square***

Proporsi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dipastikan dengan menggunakan uji koefisien determinasi *R-squared* yang dimodifikasi. Nilai *R-square* yang dimodifikasi berkisar dari 0 hingga 1. Faktor independen dapat dengan jelas menjelaskan variabel dependen jika nilai *R-square* yang dimodifikasi mendekati satu. Tingkat kemampuan variabel

independen untuk menjelaskan variabel dependen, bagaimanapun, dibatasi karena nilai R-square yang disesuaikan rendah.

### 3.5.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda pada penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh komisarisi independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Model regresi analisis regresi linear berganda yang digunakan pada penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots 3.4$$

Keterangan :

Y : Penghindaran pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien regresi variabel komisarisi independen

$\beta_2$  : Koefisien regresi variabel kompensasi kerugian fiskal

$\beta_3$  : Koefisien regresi variabel *capital intensity*

$\varepsilon$  : Error

### 3.5.5. Uji Hipotesis

Tes yang disebut uji hipotesis melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Ketika koefisien regresi negatif dan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh signifikan faktor independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien regresi positif dan tingkat signifikansi  $\geq 0,05$  (5%) maka hipotesis ditolak atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan objek perusahaan pertambangan yang ada di BEI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang berkegiatan meneliti, mengelola, dan memperdagangkan hasil alam berupa mineral yang meliputi eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kemudian pertambangan merupakan salah satu sektor terbesar yang menjadi penyumbang pendapatan negara dan salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Perusahaan pertambangan sendiri merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar diantara sektor-sektor lain.

Penelitian ini menggunakan 60 data yang diperoleh berdasarkan metode *purposive sampling*. Namun, pada saat uji kelayakan model ditemukan adanya data *extreme* yang membuat model penelitian memiliki nilai *asympt sig.*  $> 0,05$  sehingga model penelitian dinyatakan tidak layak dan memerlukan *outlier* data. *Outlier* merupakan data yang memiliki nilai yang jauh berbeda dari rangkaian data pada saat pengujian data. Menurut Field (2005) apabila dalam penelitian terdapat data *extreme*, maka hanya data tersebutlah yang dikeluarkan. Metode yang digunakan dalam *outlier* adalah *casewise diagnostic* yang memperoleh 14 data yang *extreme* sehingga jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 42 data dan saat dilakukan uji kelayakan model menghasilkan model penelitian yang layak.

**Tabel 4.1.Data Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021.	38
2	Perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang rugi dalam kurun periode 2016-2021	(28)
3	Perusahaan di industri pertambangan yang datanya tidak memenuhi kriteria variabel yang diteliti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	0
Jumlah perusahaan		10
Kuantitas data sebelum <i>outlier</i> (10 x 6 tahun)		60
Kuantitas data yang menghasilkan <i>outlier</i>		(14)
Jumlah data yang mengikuti <i>outlier</i>		46

Sumber : Data sekunder setelah diuji, 2023

## 4.2.Hasil Penelitian

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisararis independen, kompensasi kerugian fiskal, *capital intensity*, dan penghindaran pajak. Hasil uji analisis statistik deskriptif berupa nilai *mean* dan nilai standar deviasi disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	46	0.12	0.41	0.2537	0.06177
Komisaris Independen	46	0.29	0.67	0.3948	0.08071
Kompensasi Kerugian Fiskal	46	0.00	0.69	0.3918	0.34741
Capital Intensity	46	0.05	0.61	0.2285	0.13547
Valid N (listwise)	46				

Sumber : Output SPSS v22, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 46 sampel, yang mana rincian deskripsi data adalah sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dengan proksi ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,12 pada perusahaan dengan kode emiten ANTM pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,41 pada perusahaan dengan kode emiten TOBA pada tahun 2016. Kemudian penghindaran pajak memiliki nilai *mean* sebesar 0,2537 dengan standar deviasi sebesar 0,06177.
2. Variabel  $X_1$  yaitu komisaris independen yang diukur menggunakan PDKI memiliki nilai minimum sebesar 0,29 pada perusahaan dengan kode emiten ITMG pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,67 pada perusahaan dengan kode emiten TOBA pada tahun 2016. Kemudian komisaris independen memiliki nilai *mean* sebesar 0,3948 dengan standar deviasi sebesar 0,08017.
3. Variabel  $X_2$  yaitu kompensasi kerugian fiskal yang diukur menggunakan variabel *dummy* dengan nilai minimum 0,00 pada perusahaan yang tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal dan nilai maksimum 0,69 pada perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal, memiliki nilai *mean* sebesar 0,3918 dengan standar deviasi 0,34741.
4. Variabel  $X_3$  yaitu *capital intensity* yang diukur menggunakan proksi CIR memiliki nilai minimum sebesar 0,05 pada perusahaan dengan kode emiten TBMS pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0,61 pada perusahaan dengan kode emiten ANTM pada tahun 2018. Kemudian *capital intensity* memiliki nilai *mean* sebesar 0,2285 dengan standar deviasi sebesar 0,13547.

## 4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Menurut Gani & Amalia (2018) uji normalitas data ini harus dijalankan sebelum data ditangani. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengidentifikasi data pada variabel penelitian. Data dengan distribusi normal dapat diterima dan layak digunakan dalam penelitian. Tes *Kolmogorov-Smirnov* dapat digunakan untuk menilai normalitas data. Plot probabilitas normal, yang membedakan distribusi kumulatif dengan distribusi normal, merupakan alat yang berguna untuk melakukan uji normalitas yang baik. Normalitas data dapat ditinjau dengan cara melihat nilai *Asym Sig (2-tailed)* dan grafik histogram. Jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih besar dari 5% (0,05) dan grafik berbentuk lonceng, maka data dianggap normal. Sedangkan jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* < 5% (0,05) serta grafik yang tidak konsisten maka data tidak terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan sebelum dan setelah outlier yang disebabkan adanya data *extreme*. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas K-S sebelum *outlier* pada halaman selanjutnya:

Tabel 4.3 Uji K-S di Awal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.15471587
Most Extreme Differences	Absolute	0.179
	Positive	0.179
	Negative	-0.109
Test Statistic		0.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 <sup>c</sup>

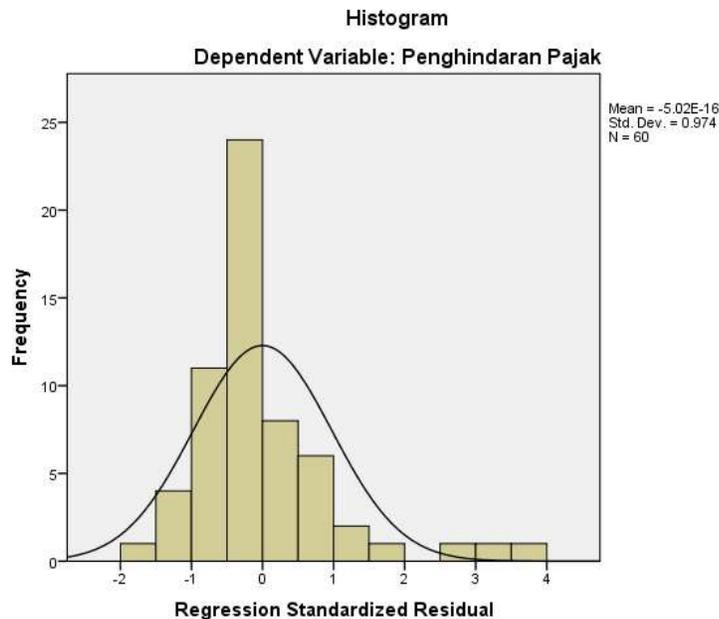
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS v22, 2022

Gambar 4.1 Uji Grafik Histogram di awal



Sumber : SPSS 22.0

Berdasarkan output SPSS di atas, tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,00 < 0,05$  dan bentuk grafik histogram yang

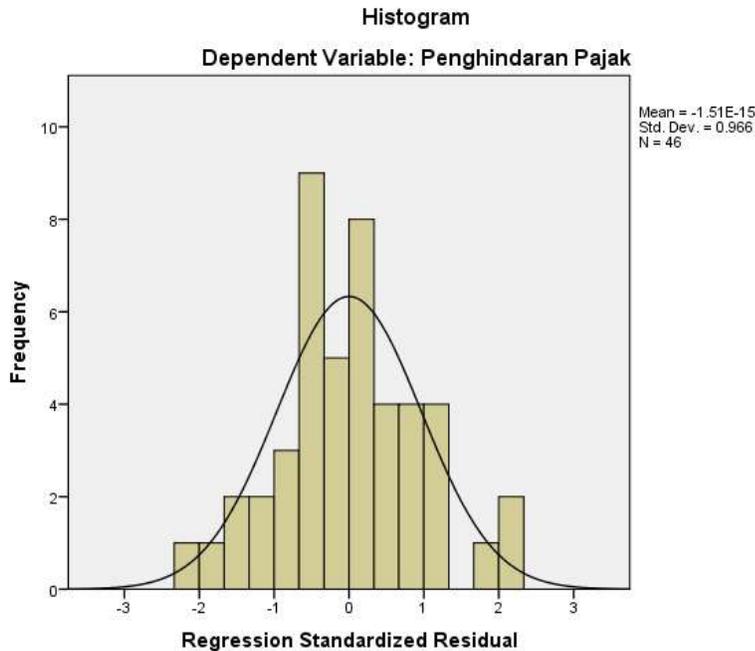
menyimpang ke kiri. Sehingga dapat diasumsikan bahwa uji normalitas belum terpenuhi karena data tidak terdistribusi normal yang disebabkan adanya data extreme. Oleh sebab itu diperlukan outlier data dengan menggunakan metode *casewise diagnostic* dengan batas standar deviasi 2,2 dan terdapat 14 data yang extreme, sehingga jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 46 data. Berikut merupakan hasil uji normalitas One Sample K-S dan grafik histogram setelah outlier:

**Tabel 4.4 Uji K-S di Akhir**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.04899050
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.070
	Negative	-0.065
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS v22,2022



**Gambar 4.2 Uji Normalitas Grafik Histogram sesudah outlier**

Sumber : SPSS 22.0

Berdasarkan output SPSS pada tabel 4.4 dan gambar 4.2, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$  dan bentuk grafik histogramnya berada di tengah atau tidak condong ke kiri dan ke kanan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa uji normalitas terpenuhi dan variabel penelitian terdistribusi dengan normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki keterkaitan dalam suatu model. Menurut Gani & Amalia (2018) gejala multikolinearitas tidak terjadi dalam model regresi jika nilai *tolerance*  $> 0,100$  dan nilai *VIF*  $< 10,00$ . Berikut merupakan tabel hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komisaris Independen	0.932	1.072
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.957	1.045
	Capital Intensity	0.955	1.047

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Sumber : SPSS 22.0

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* adalah  $> 0,100$  dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah  $< 10,00$ . Nilai *tolerance* dari komisaris independen sebesar = 0,932. Kemudian nilai *tolerance* dari kompensasi kerugian fiskal sebesar = 0,957. Terakhir, nilai *tolerance* dari *capital intensity* sebesar = 0,955. Nilai VIF dari komisaris independen sebesar = 1,072; nilai VIF dari kompensasi kerugian fiskal sebesar = 1,045; dan nilai VIF dari *capital intensity* sebesar = 1,047. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas maka model regresi penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

#### 4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk memastikan apakah ada korelasi antara variabel sebelumnya dan faktor perancu pada titik waktu tertentu. Menurut Gani & Amalia (2018) uji Durbin Watson dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.6 Uji Autokorelasi *Durbin Watson***

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.371	8.253	3	42	.000	1.270

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4.6, nilai dari Durbin Watson = 1.270. Nilai  $d_u$  dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson. Berdasarkan variabel independen  $k = 3$  dan jumlah data acuan  $n = 46$  dengan signifikansi 5% nilai  $d_u = 1.667$  dan  $d_l = 1.391$  maka  $d_u < Dw < (4 - d_u) = 1.667 < 1.757 < 2.333$ . Maka dari itu, variabel independen pada penelitian ini terindikasi autokorelasi terhadap sesama variabel independen.

Namun peneliti menggunakan uji tambahan yaitu uji *run test* dengan kriteria yaitu tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *Asymp Sig (2-tailed) < 5% (0,05)*.

Berikut hasil dari uji *run test* :

**Tabel 4.7 Uji Autokorelasi *Run Test***

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	0.00033
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	23
Total Cases	46
Number of Runs	19
Z	-1.342
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.180

a. Median

Sumber: SPSS v22, 2023

Berdasarkan tabel 4.8, nilai dari uji *run test* adalah 0,180. Sehingga model penelitian terhindar dari gejala autokorelasi.

#### 4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Menurut Gani & Amalia (2018) uji heteroskedastisitas menguji adanya perbedaan antara varian dan nilai sisa. Uji Glejser adalah salah satu metode untuk menentukan apakah varian dalam residual satu pengamatan berbeda dengan yang lain dalam model regresi. Jika terjadi, fenomena ini disebut heteroskedastisitas, dan variabel dinyatakan dalam posisi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser berupa tabel* yang akan disajikan pada halaman selanjutnya:

**Tabel 4.8 Uji Glejser**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.038	0.025		1.492	0.143
	Komisaris Independen	-0.003	0.060	-0.007	-0.045	0.964
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.011	0.014	0.122	0.781	0.439
	Capital Intensity	-0.015	0.036	-0.066	-0.423	0.675

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: SPSS v22, 2023

Pada tabel 4.8 hasil output SPSS di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, ditandai dengan nilai variabel komisaris independen 0,964, variabel kompensasi kerugian fiskal 0,439, dan variabel *capital intensity* 0,675. Sehingga variabel yang diuji tidak terindikasi mengalami heteroskedastisitas.

### 4.2.3. Uji Kelayakan Model

#### 4.2.3.1 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan pada penelitian layak untuk dilakukan pengujian statistik dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Hasil pengujian kelayakan model disampaikan melalui tabel berikut :

**Tabel 4.9 Uji F (Kelayakan Model)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.064	3	0.021	8.253	0.000b
	Residual	0.108	42	0.003		
	Total	0.172	45			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen

Sumber: SPSS v22, 2022

Berdasarkan *output* dari data di atas, tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari tabel Anova sebesar  $0,000 < 0,05$ .

#### 4.2.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square*

Uji koefisien determinasi *adjusted R-square* bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted R-square* berada di antara nol dan satu, di mana semakin nilai *adjusted R-square* mendekati angka satu maka semakin jelas variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan *output* dari uji koefisien determinasi *adjusted R-square*:

**Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square***

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.609a	0.371	0.326	0.05071

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: SPSS v22, 2022

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,371, yang artinya variabel komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity* mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 37,1% sedangkan persentase selebihnya yaitu 62,9% dijelaskan oleh variabel lain.

#### 4.2.4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen diperiksa dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian analisis regresi linier berganda menghasilkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.088	0.041		2.151	0.037
	Komisaris Independen	0.467	0.097	0.611	4.817	0.000
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.024	0.022	0.138	1.100	0.278
	Capital Intensity	-0.124	0.057	-0.272	-2.170	0.036

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Output SPSS v22, 2022

Berdasarkan output SPSS di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,088 + 0,467X_1 \text{ PDKI} + 0,024X_2 \text{ KKF} - 0,124X_3 \text{ CIR} + \varepsilon$$

Dapat disimpulkan dari persamaan regresi sebelumnya bahwa:

### 1. Konstanta ( $\alpha$ )

Jika variabel independen dimasukkan dalam persamaan regresi yaitu komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity* maka nilai konstanta menunjukkan ETR akan memiliki nilai sebesar 0,088. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jika tidak ada variabel komisaris independen, kompensasi kerugian fiskal, dan *capital intensity* maka penghindaran pajak akan berkurang sebesar 0,088. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik.

### 2. Koefisien variabel $X_1$ (Komisaris Independen)

Nilai koefisien regresi  $\beta_1$  menunjukkan bahwa jika variabel komisaris independen bertambah satu satuan, maka ETR akan bertambah sebesar 0,467 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. Dapat dikatakan jika variabel komisaris independen bertambah satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,467. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan demikian komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 3. Koefisien variabel $X_2$ (Kompensasi Kerugian Fiskal)

Nilai koefisien regresi  $\beta_2$  menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi kerugian fiskal bertambah satu kali, maka ETR akan berkurang sebesar 0,024 dengan dengan asumsi bahwa variabel independen yang tersisa

stabil. Dengan demikian diartikan penghindaran pajak akan menurun jika variabel kompensasi kerugian fiskal meningkat satu satuan yaitu sebesar 0,013. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan demikian kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Koefisien variabel $X_3$ (*Capital Intensity*)

Nilai koefisien regresi  $\beta_3$  menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya tidak berubah, maka ETR akan turun sebesar 0,124 jika variabel intensitas modal meningkat sebesar satu rasio. Oleh karena itu, penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,124 jika variabel intensitas modal dinaikkan satu rasio. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan demikian *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 4.2.5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis berusaha untuk menentukan bagaimana faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan diterima, maka variabel independen dianggap mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan penjelasan mengenai hipotesis berdasarkan data pada tabel 4.11:

1. Variabel Komisararis Independen memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar 0,467. Nilai koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai komisararis independen maka semakin tinggi nilai ETR perusahaan yang artinya bahwa tingkat

penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan demikian, Dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. atau dengan kata lain  $H_1$  ditolak.

2. Variabel Kompensasi Kerugian Fiskal memiliki nilai sig  $0,278 > 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar  $0,024$ . Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa nilai ETR perusahaan meningkat secara proporsional dengan nilai kompensasi kerugian fiskal, menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, dikarenakan secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan, jika ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, maka faktor tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain  $H_2$  ditolak.
3. Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,036 < 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar  $-0,124$ . Nilai positif dari koefisien menunjukkan bahwa semakin tinggi penghargaan kekuatan modal, semakin rendah penghargaan ETR organisasi, dan itu menyiratkan bahwa tingkat penghindaran pajak oleh organisasi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain  $H_3$  diterima.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar 0,436. Nilai koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai komisaris independen maka semakin tinggi nilai ETR perusahaan yang artinya bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.

Dalam teori agensi, wajib pajak diasumsikan sebagai agen, sementara DJP bertindak sebagai prinsipal. Komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa direksi mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan pajak.

Namun, jika ditinjau dari hasil, maka hal tersebut dapat mengancam hubungan agensi yang ada antara DJP dan direksi perusahaan. Komisaris independen harus memastikan bahwa direksi perusahaan mematuhi aturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik.

Jika komisaris independen tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, maka perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan DJP. Praktik penghindaran pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara, sehingga dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk membiayai program-program pemerintah.

Untuk menjamin bahwa perusahaan mematuhi aturan dan peraturan yang relevan dalam hal perpajakan, penting bagi seorang komisaris independen untuk memiliki keahlian dan kesadaran yang cukup tentang masalah perpajakan.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Rani (2017) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **4.3.2 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel Kompensasi Kerugian Fiskal memiliki nilai sig  $0,278 > 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar  $0,024$ . Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa nilai ETR perusahaan meningkat secara proporsional dengan nilai kompensasi kerugian fiskal, menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Namun, dikarenakan secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan, jika ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, maka faktor tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Teori agensi memandang hubungan antara agen dan prinsipal sebagai hubungan yang melibatkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, perusahaan (agen) memiliki motivasi untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan, sedangkan otoritas pajak (prinsipal) berusaha untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang maksimal.

Kompensasi kerugian fiskal memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak masa depan dengan mengimbangi kerugian yang terjadi di masa lalu. Hal ini dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menghindari pajak

lebih lanjut atau memanipulasi laba mereka agar memperoleh kerugian fiskal yang lebih besar. Dalam hal ini, penghindaran pajak dapat terjadi sebagai respons terhadap adanya kompensasi kerugian fiskal.

Meskipun pengaruh negatif dapat ada, penting untuk diingat bahwa penghindaran pajak melibatkan banyak faktor dan strategi yang kompleks. Kompensasi kerugian fiskal hanya merupakan salah satu aspek dari strategi penghindaran pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Faktor-faktor lain, seperti struktur perusahaan, penggunaan celah hukum, atau praktik *transfer pricing*, mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, pengaruh kompensasi kerugian fiskal secara langsung terhadap penghindaran pajak dapat dianggap tidak signifikan.

Penting untuk mencatat bahwa kompensasi kerugian fiskal adalah bagian dari kerangka hukum perpajakan yang sah dan diperbolehkan oleh aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan kompensasi kerugian fiskal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tidak melanggar hukum. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konteks etika. Meskipun legal, penggunaan kompensasi kerugian fiskal secara berlebihan atau dengan tujuan tunggal untuk menghindari pajak dapat menimbulkan pertanyaan etis.

hasil dari kompensasi kerugian fiskal dapat memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, tetapi pengaruh tersebut mungkin tidak signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang terlibat dalam praktik penghindaran

pajak. Penting untuk menganggap konteks hukum dan etika dalam memahami pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Mulyana *et al.* (2020) yang menyimpulkan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **4.3.3 Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,036 < 0,05$  dan memiliki koefisien sebesar  $-0,124$ . Nilai koefisien negatif mengarah pada kesimpulan bahwa nilai ETR perusahaan menurun secara proporsional dengan intensitas modal, menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara agen (wajib pajak) dan prinsipal (pemerintah atau otoritas pajak) yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengelola pajak mereka. Capital intensity (tingkat intensitas modal) mengacu pada jumlah modal atau investasi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tingkat pendapatan atau produksi. Dalam konteks penghindaran pajak, tingkat capital intensity dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memanipulasi laba dan meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Dalam hal ini, penelitian telah menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat capital intensity sebuah perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka akan memanfaatkan celah dalam sistem pajak untuk menghindari membayar pajak yang seharusnya mereka bayar.

Dalam konteks teori agensi, agen (wajib pajak) cenderung mengambil tindakan untuk meminimalisir penerimaan pajak mereka, sedangkan prinsipal (otoritas pajak) cenderung mengambil tindakan untuk memaksimalkan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, ketika prinsipal menghadapi tingkat *capital intensity* yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih aktif dalam upaya menghindari pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka akan mencari cara untuk mengoptimalkan beban depresiasi untuk menghindari pajak.

Dalam hal ini, penting bagi otoritas pajak untuk memperhatikan perbedaan dalam tingkat *capital intensity* antara perusahaan dan memperhitungkan hal ini dalam mengembangkan kebijakan pajak. Otoritas pajak mungkin berpikir untuk memperketat pengawasan mereka terhadap strategi penghindaran pajak bisnis ini.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Humairoh & Triyanto (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas modal, kompensasi kerugian fiskal, dan komisaris independen terhadap penggelapan pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh komisaris independen.
2. Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh kompensasi kerugian fiskal.
3. Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *capital intensity*.

#### 5.2 Saran

Ada beberapa ide untuk studi lebih lanjut yang dapat digunakan berdasarkan temuan penelitian, diskusi, dan kesimpulan yang ditunjukkan di atas, termasuk:

1. Penting untuk memperkuat peran komisaris independen dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan pajak. Komisaris independen harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan potensi praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dilakukan

melalui pelatihan dan pendidikan yang memperkuat pemahaman mereka tentang aspek perpajakan yang relevan.

2. Memberikan contoh konkret atau studi kasus untuk menggambarkan bagaimana kompensasi kerugian fiskal dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan insentif yang terlibat dalam penghindaran pajak.
3. Dalam situasi dengan tingkat capital intensity yang tinggi, pemilik atau pemegang saham dapat mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan beban depresiasi perusahaan. Ini melibatkan mencari cara yang sah untuk memanfaatkan aturan perpajakan terkait depresiasi aset tetap guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi*, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 15, 584–613.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pajak*. 2022. <https://pajak.go.id/>
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).
- Eisenhardt, K. (2009). Agency Theory: An Assessment and Review. In *Theories of Organization*. SAGE Publications.
- G20 Presidency of Indonesia. (2022). *G20 Presidency of Indonesia*. 2022. <https://g20.org/id/home-2/>
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data* (P. Christian, Ed.; Revisi). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Humairoh, N. R., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3.
- Jensen, M. C., & Mekling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Center for Research in Government Policy & Business, Graduate School of Management, University of Rochester.
- Kementerian Keuangan RI. (2012). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012*.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26.2., 1601–1631. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.2.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal FEB Unmul*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset terhadap Penghindaran Pajak. *SIKAP*, 4(2), 160–172. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>

- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014*.
- Pemerintah RI. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17.1.
- Putri, N. R., & Irawati, W. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Effective Tax Rate Terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1). <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10.
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Observation and Research of Taxation (Ortax).
- Saputra, Abd. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*, 1. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Sugiyanto, Setiawan, I., & Fitria, J. R. (2020). Effect of Executive Character," Capital Intensity and "Good Corporate Governance " to Tax Avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Universitas Muria Kudus*.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Penghindaran Pajak

Tahun	Kode	Beban Pajak Kini	Laba Sebelum Pajak	ETR
2021	ADRO	561,831,000	1,486,251,000	0.38
2021	ANTM	1,033,701,000,000	3,043,509,000,000	0.34
2020	ANTM	476,465,000,000	1,641,178,000,000	0.29
2018	ANTM	293,740,296,000	2,013,152,801,000	0.15
2017	ANTM	52,725,661,000	454,396,524,000	0.12
2021	BSSR	60,732,298	264,208,458	0.23
2020	BSSR	10,261,744	40,839,013	0.25
2019	BSSR	11,904,639	41,316,129	0.29
2018	BSSR	24,826,109	93,354,875	0.27
2017	BSSR	29,298,068	111,688,566	0.26
2016	BSSR	8,289,684	35,592,255	0.23
2021	BYAN	362,511,512	1,627,573,741	0.22
2020	BYAN	64,498,261	426,635,647	0.15
2019	BYAN	74,447,630	311,625,370	0.24
2018	BYAN	157,696,558	696,732,272	0.23
2017	BYAN	87,189,143	420,082,773	0.21
2021	HRUM	29,087,809	127,541,480	0.23
2019	HRUM	5,505,306	25,627,895	0.21
2018	HRUM	7,986,047	48,191,469	0.17
2017	HRUM	17,282,967	73,030,968	0.24
2021	ISSP	160,417,000,000	659,402,000,000	0.24

*Disambung ke Halaman Selanjutnya*

**Lampiran 1. Lanjutan**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>ETR</b>
2020	ISSP	41,436,000,000	155,068,000,000	0.27
2019	ISSP	59,131,000,000	233,293,000,000	0.25
2016	ISSP	42,345,000,000	139,149,000,000	0.30
2021	ITMG	140,347,000	621,089,000	0.23
2020	ITMG	24,193,000	72,553,000	0.33
2019	ITMG	326,707,725	1,619,725,022	0.41
2018	ITMG	106,337,000	367,363,000	0.29
2017	ITMG	100,513,000	362,055,000	0.28
2016	ITMG	60,983,000	191,991,000	0.32
2021	PTBA	2,278,680,000,000	10,358,675,000,000	0.22
2020	PTBA	600,130,000,000	3,231,685,000,000	0.19
2019	PTBA	1,202,302,000,000	5,455,162,000,000	0.22
2018	PTBA	1,500,491,000,000	6,799,056,000,000	0.22
2017	PTBA	1,530,228,000,000	6,067,783,000,000	0.25
2016	PTBA	626,604,000,000	2,696,916,000,000	0.23
2021	TBMS	2,191,055	9,147,154	0.24
2020	TBMS	1,345,940	5,789,667	0.23
2019	TBMS	2,143,332	7,957,075	0.27
2018	TBMS	2,134,122	8,503,457	0.25
2017	TBMS	3,135,760	10,623,879	0.30
2016	TBMS	2,543,628	9,665,458	0.26
2019	TOBA	9,435,327	62,869,168	0.15

*Disambung ke Halaman Selanjutnya*

**Lampiran 1. Lanjutan**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>ETR</b>
2018	TOBA	27,657,977	97,281,622	0.28
2017	TOBA	18,994,879	60,195,507	0.32
2016	TOBA	10,653,542	25,984,193	0.41

**Lampiran 2. Data Komisaris Independen**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>PDKI</b>
2021	ADRO	2	5	0.40
2021	ANTM	3	5	0.60
2020	ANTM	3	5	0.60
2018	ANTM	2	6	0.33
2017	ANTM	2	6	0.33
2021	BSSR	3	8	0.38
2020	BSSR	3	8	0.38
2019	BSSR	3	8	0.38
2018	BSSR	3	8	0.38
2017	BSSR	2	6	0.33
2016	BSSR	3	8	0.38
2021	BYAN	2	4	0.50
2020	BYAN	2	5	0.40
2019	BYAN	2	5	0.40
2018	BYAN	2	6	0.33
2017	BYAN	2	5	0.40
2021	HRUM	2	6	0.33
2019	HRUM	2	6	0.33
2018	HRUM	2	6	0.33
2017	HRUM	2	6	0.33
2021	ISSP	2	4	0.50
2020	ISSP	2	4	0.50
2019	ISSP	2	5	0.40
2016	ISSP	2	5	0.40
2021	ITMG	3	7	0.43
2020	ITMG	3	7	0.43
2019	ITMG	3	6	0.50
2018	ITMG	2	5	0.40
2017	ITMG	2	7	0.29
2016	ITMG	2	7	0.29
2021	PTBA	2	6	0.33
2020	PTBA	2	6	0.33
2019	PTBA	2	6	0.33

*Disambung ke halaman selanjutnya*

**Lampiran 2. Sambungan**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>PDKI</b>
2018	PTBA	2	6	0.33
2017	PTBA	2	6	0.33
2016	PTBA	2	6	0.33
2021	TBMS	2	5	0.40
2020	TBMS	2	5	0.40
2019	TBMS	2	5	0.40
2018	TBMS	2	5	0.40
2017	TBMS	2	5	0.40
2016	TBMS	2	5	0.40
2019	TOBA	1	3	0.33
2018	TOBA	2	5	0.40
2017	TOBA	2	5	0.40
2016	TOBA	2	3	0.67

**Lampiran 3. Data Kompensasi Kerugian Fiskal**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Memiliki Kompensasi</b>	<b>Tidak Memiliki Kompensasi</b>
2021	ADRO	0,69	
2021	ANTM		0,00
2020	ANTM	0,69	
2018	ANTM	0,69	
2017	ANTM	0,69	
2021	BSSR		0,00
2020	BSSR		0,00
2019	BSSR		0,00
2018	BSSR		0,00
2017	BSSR		0,00
2016	BSSR	0,69	
2021	BYAN		0,00
2020	BYAN		0,00
2019	BYAN	0,69	
2018	BYAN	0,69	
2017	BYAN	0,69	
2021	HRUM	0,69	
2019	HRUM	0,69	
2018	HRUM	0,69	
2017	HRUM	0,69	
2021	ISSP		0,00
2020	ISSP		0,00
2019	ISSP		0,00
2016	ISSP		0,00
2021	ITMG	0,69	
2020	ITMG	0,69	
2019	ITMG	0,69	
2018	ITMG	0,69	
2017	ITMG	0,69	
2016	ITMG	0,69	
2021	PTBA	0,69	
2020	PTBA	0,69	
2019	PTBA		0,00

*Disambung ke halaman selanjutnya*

**Lampiran 3. Sambungan**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Memiliki Kompensasi</b>	<b>Tidak Memiliki Kompensasi</b>
2020	TBMS		0,00
2019	TBMS		0,00
2018	TBMS		0,00
2017	TBMS		0,00
2016	TBMS		0,00
2019	TOBA	0,69	
2018	TOBA	0,69	
2017	TOBA	0,69	
2016	TOBA	0,69	

**Lampiran 4. Data *Capital Intensity***

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Total Aset</b>	<b>CIR</b>
2021	ADRO	1,397,105	7,586,936	0.18
2021	ANTM	16,863,748,000,000	32,916,154,000,000	0.51
2020	ANTM	18,248,068,000,000	31,729,513,000,000	0.58
2018	ANTM	19,489,671,241,000	32,195,350,845,000	0.61
2017	ANTM	14,092,994,799,000	30,014,273,452,000	0.47
2021	BSSR	61,072,056	435,317,386	0.14
2020	BSSR	57,066,668	263,343,768	0.22
2019	BSSR	61,167,459	250,680,316	0.24
2018	BSSR	61,417,640	245,106,202	0.25
2017	BSSR	63,833,889	210,137,454	0.30
2016	BSSR	68,829,822	183,981,910	0.37
2021	BYAN	424,546,437	2,433,712,191	0.17
2020	BYAN	106,337,000	367,363,000	0.20
2019	BYAN	330,906,389	1,278,040,123	0.26
2018	BYAN	299,319,453	1,150,863,891	0.26
2017	BYAN	259,468,439	888,813,140	0.29
2021	HRUM	58,747,133	874,621,599	0.07
2019	HRUM	74,908,747	447,001,954	0.17
2018	HRUM	82,159,276	467,989,195	0.18
2017	HRUM	80,501,053	459,443,071	0.18
2021	ISSP	2,214,814,000,000	7,097,322,000,000	0.31
2020	ISSP	2,197,790,000,000	6,076,604,000,000	0.36

*Disambung ke halaman selanjutnya*

**Lampiran 4. Sambungan**

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Total Aset</b>	<b>CIR</b>
2019	ITMG	222,805,000	1,209,041,000	0.18
2018	ITMG	227,294,000	1,442,728,000	0.16
2017	ITMG	222,537,000	1,358,663,000	0.16
2016	ITMG	223,796,000	1,209,792,000	0.18
2021	PTBA	8,321,231,000,000	36,123,703,000,000	0.23
2020	PTBA	7,863,615,000,000	24,056,755,000,000	0.33
2019	PTBA	7,272,751,000,000	26,098,052,000,000	0.28
2018	PTBA	6,547,586,000,000	24,172,933,000,000	0.27
2017	PTBA	6,199,299,000,000	21,987,482,000,000	0.28
2016	PTBA	6,087,746,000,000	18,576,774,000,000	0.33
2021	TBMS	8,303,660	147,236,098	0.06
2020	TBMS	9,075,738	156,833,246	0.06
2019	TBMS	9,351,624	153,990,491	0.06
2018	TBMS	9,473,126	190,954,156	0.05
2017	TBMS	10,386,302	164,820,670	0.06
2016	TBMS	11,835,671	129,799,075	0.09
2019	TOBA	37,415,373	634,640,456	0.06
2018	TOBA	42,035,437	501,883,194	0.08
2017	TOBA	46,554,610	348,338,028	0.13
2016	TOBA	47,389,456	261,588,159	0.18

**Lampiran 5. Data *Outlier***

<b>Tahun</b>	<b>Kode</b>	<b>Y</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>
2020	ADRO	0.73	0.40	2	0.24
2019	ADRO	0.39	0.40	1	0.24
2018	ADRO	0.52	0.40	2	0.23
2017	ADRO	0.46	0.40	2	0.22
2016	ADRO	0.45	0.40	1	0.24
2019	ANTM	0.62	0.33	2	0.62
2016	ANTM	0.01	0.33	2	0.43
2016	BYAN	0.78	0.40	2	0.30
2020	HRUM	0.06	0.33	2	0.14
2016	HRUM	0.39	0.33	1	0.22
2018	ISSP	0.36	0.40	1	0.33
2017	ISSP	0.92	0.40	1	0.33
2021	TOBA	0.12	0.50	2	0.03
2020	TOBA	0.09	0.33	2	0.04

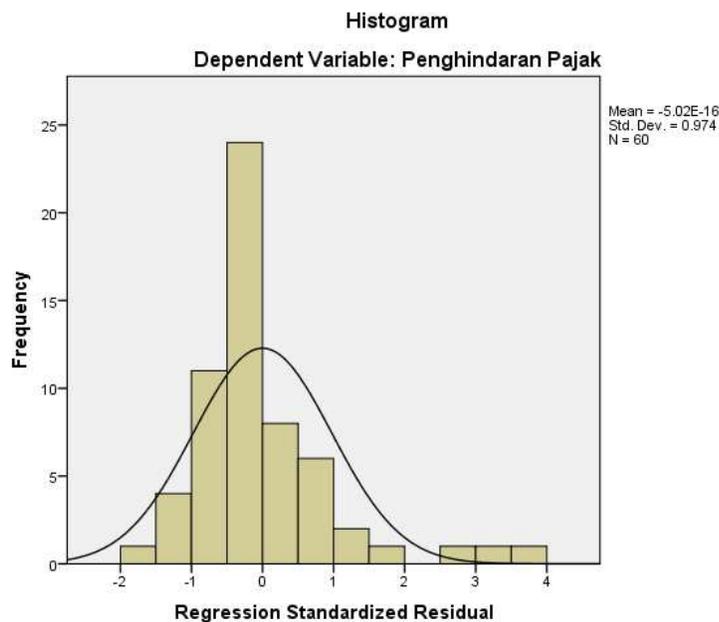
## Lampiran 6. Output SPSS

### Uji K-S di Awal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.15471587
Most Extreme Differences	Absolute	0.179
	Positive	0.179
	Negative	-0.109
Test Statistic		0.179
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 Sumber: Output SPSS v22, 2022

### Uji Grafik Histogram di awal



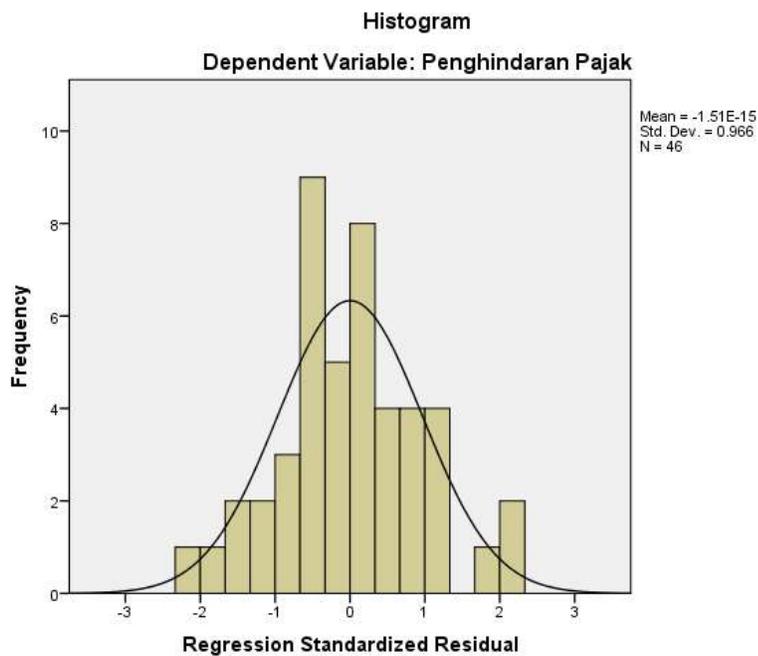
Sumber : SPSS 22.0

### Uji K-S di Akhir

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.04899050
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.070
	Negative	-0.065
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS v22,2022



Gambar 4.2 Uji Normalitas Grafik Histogram sesudah *outlier*

Sumber : SPSS 22.0

### Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komisaris Independen	0.932	1.072
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.957	1.045
	Capital Intensity	0.955	1.047

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Sumber : SPSS 22.0

### Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.371	8.253	3	42	.000	1.270

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen  
 b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Sumber : SPSS 22.0

### Uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	0.00033
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	23
Total Cases	46
Number of Runs	19
Z	-1.342
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.180

a. Median

Sumber: SPSS v22, 2023

### Uji Glejser

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.038	0.025		1.492	0.143
	Komisaris Independen	-0.003	0.060	-0.007	-0.045	0.964
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.011	0.014	0.122	0.781	0.439
	Capital Intensity	-0.015	0.036	-0.066	-0.423	0.675

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: SPSS v22, 2023

### Uji F (Kelayakan Model)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.064	3	0.021	8.253	0.000b
	Residual	0.108	42	0.003		
	Total	0.172	45			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen  
 Sumber: SPSS v22, 2022

### Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R-Square*

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.609 <sup>a</sup>	0.371	0.326	0.05071

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: SPSS v22, 2022

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.088	0.041		2.151	0.037
	Komisaris Independen	0.467	0.097	0.611	4.817	0.000
	Kompensasi Kerugian Fiskal	0.024	0.022	0.138	1.100	0.278
	Capital Intensity	-0.124	0.057	-0.272	-2.170	0.036

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Output SPSS v22, 2022